

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIAMIS**

Winda Pujayanty  
Email: [windapjy@gmail.com](mailto:windapjy@gmail.com)  
Universitas Galuh

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tercapainya tujuan dari adanya kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis serta apa saja faktor pendukung dan penghambat adanya kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer (Dinas, Pengelola desa wisata dan Desa) dan data skunder (dokumen, buku dan laporan). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (literatur dan dokumentasi), studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis masih rendah, dilihat dari 3 indikator yang diukur semuanya belum berjalan dengan optimal yaitu pencapaian, adaptasi dan integrasi kebijakan desa wisata di Kabupaten ciamis. Adapun faktor penghambat yang dihadapi yaitu kurangnya promosi dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata, kurangnya pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengelola media sosial dan pemasaran digital dan keterbatasan akses ke informasi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pembangunan jalan, penyediaan pelatihan dan pendidikan dan melakukan monitoring secara teratur.

**Kata kunci:** Efektifitas, Kebijakan Desa Wisata, Pemerintah Daerah.

**Abstract:** *This research is motivated by the fact that the objectives of the tourism village policy in Ciamis Regency have not been achieved. This research aims to find out how effective the tourism village policy is in Ciamis Regency and what are the supporting and inhibiting factors for the existence of tourism village policy in Ciamis Regency. The research method used in this research method is qualitative. Data sources consist of primary data (Department, tourism village and village managers) and secondary data (documents, books and reports). Data collection techniques were carried out using library studies (literature and documentation), field studies (observation, interviews and documentation). Data analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the effectiveness of tourism village policies in Ciamis Regency is still low, seen from the 3 indicators measured, all of which have not run optimally, namely achievement, adaptation and integration of tourism village policies in Ciamis Regency. The inhibiting factors faced are lack of promotion and uneven infrastructure development, lack of special knowledge and skills in managing social media and digital marketing and limited access to information. The efforts made to overcome these obstacles include development, providing training and education and carrying out regular monitoring.*

**Keywords:** *Effectiveness, Tourism Village Virtue, Regional Government.*

**PENDAHULUAN**

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, desa wisata memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan peluang usaha dan lapangan kerja yang merata, mengoptimalkan potensi ekonomi serta ciri khas daerah, serta mempromosikan dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi, serta menjaga kelestarian alam.

Desa wisata merujuk kepada area yang terkait dengan wilayah atau kearifan

local seperti adat istiadat, budaya dan potensi lokal yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kapasitasnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi Masyarakat (Kurniawan & Undang, 2023, pp. 26–27). Desa wisata menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan untuk memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengubah desa menjadi desa wisata, perlu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi alam dan budaya manusianya yang unik, sehingga menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Mengunjungi desa wisata dengan berbagai macam atraksi memberikan kesan yang berbeda, memungkinkan kita untuk belajar tentang budaya daerah tersebut.

Berikut ini merupakan daftar Desa Wisata di Kabupaten Ciamis Tahun 2020–2023.

Tabel 1. Daftar Desa Wisata di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 - 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KET</b>
1	Kawali	Kawali	Rintisan
2	Winduraja	Kawali	Berkembang
3	Talagasari	Kawali	Rintisan
4	Sidamulih	Pamarican	Rintisan
5	Mekarsari	Tambaksari	Rintisan
6	Ciakar	Cipaku	Rintisan
7	Cintanagara	Jatinagara	Rintisan
8	Karangkamulyan	Cijeungjing	Rintisan
9	Bangunharja	Cisaga	Berkembang
10	Cisontrol	Rancah	Berkembang
11	Situmandala	Rancah	Rintisan
12	Wanasigra	Sindangkasih	Rintisan
13	Sukahurip	Cihaurbeuti	Rintisan
14	Sumberjaya	Cihaurbeuti	Rintisan
15	Ciomas	Panjalu	Rintisan
16	Panjalu	Panjalu	Berkembang
17	Cikupa	Banjaranyar	Rintisan
18	Banjaranyar	Banjaranyar	Berkembang
19	Karangpaningal	Tambaksari	Rintisan
20	Baregbeg	Lakbok	Rintisan
21	Cibeureum	Sukamantri	Berkembang
22	Gunungsari	Sadananya	Berkembang
23	Kawasen	Banjarsari	Rintisan
24	Sagalاهرang	Panawangan	Rintisan
25	Kertajaya	Panawangan	Rintisan
26	Raksabaya	Cimaragas	Rintisan
27	Pusakasari	Cipaku	Rintisan
28	Sadewata	Lumbung	Rintisan
29	Cimari	Cikoneng	Rintisan
30	Sukajaya	Rajadesa	Rintisan
31	Jalatrang	Cipaku	Berkembang
32	Rajadesa	Rajadesa	Berkembang
33	Sukamaju	Cihaurbeuti	Berkembang
34	Selamanik	Cipaku	Berkembang
35	Sukaresik	Sindangkasih.	Rintisan
36	Darmacaang	Cikoneng	Rintisan

37	Kaso	Tambaksari	Rintisan
38	Bahara	Panjalu	Rintisan
39	Sukadana	Sukadana	Rintisan
40	Cibadak	Banjarsari	Rintisan
41	Nasol	Cikoneng	Rintisan
42	Gunungcupu	Sindangkasih	Rintisan
43	Kadupandak	Tambaksari	Rintisan
44	Sukasenang	Sindangkasih	Rintisan
45	Jagabaya	Panawangan	Rintisan
46	Kertabumi	Cijeungjing	Rintisan
47	Giriharja	Rancah	Rintisan
48	Werasari	Sadananya	Rintisan
49	Cisadap	Ciamis	Rintisan
50	Panyingkiran	Ciamis	Rintisan
51	Sukawening	Cipaku	Rintisan
52	Kertamandala	Panjalu	Rintisan
53	Padmulya	Cihaurbeuti	Rintisan
54	Tanjungsari	Sadananya	Rintisan
55	Sukasetia	Cihaurbeuti	Rintisan
56	Maparah	Panjalu	Rintisan
57	Sandingtaman	Panjalu	Rintisan

*Sumber: (Ciamis, 2023, p. 111)*

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2020 – 2023 ada 57 desa wisata di Kabupaten Ciamis diantaranya: 46 desa wisata yang termasuk kategori rintisan dan 11 desa wisata yang termasuk kategori berkembang. Ini berarti ada banyak desa wisata yang masih dalam kategori pengembangan awal, di mana mereka masih mengembangkan potensi mereka untuk menjadi destinasi wisata. Sarana dan prasarana wisata mereka terbatas, kunjungan wisatawan masih sedikit, kesadaran masyarakat tentang pentingnya wisata masih rendah, dan mereka masih bergantung pada dukungan pemerintah.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, dari 57 desa wisata yang sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, hanya 11 desa wisata yang berhasil mencapai perubahan dan peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat. Sementara itu, 46 desa wisata lainnya tidak memberikan dampak yang berarti, bahkan beberapa di antaranya mengalami kebengkalian.

Melihat permasalahan tersebut, diperkirakan bahwa efektifitas implementasi regulasi terkait desa wisata di Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tidak berjalan secara efektif. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Efektifitas Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas Kebijakan Desa Wisata dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari adanya Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, ini didasarkan pada alasan bahwa jenis penelitian ini tepat untuk mengkonstruksi tentang pengalaman yang dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Kuswanto, 2006, p. 49) yang

mengatakan “jika peneliti berupaya menggambarkan fenomena dari suatu komunitas menurut pandangan mereka sendiri, maka tradisi yang sesuai penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui “pertanyaan pancingan”, subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena/peristiwa. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama atau sumber pertama di lapangan (Sapto Haryoko et al, 2020:122). Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata, Pengelola Desa Wisata dan Desa. Data sekunder merupakan informasi, fakta, dan realitas yang berkaitan atau relevan dengan penelitian, meskipun tidak diperoleh langsung dari sumber utama atau merupakan bahan pendukung yang relevan dengan data primer (Sapto Haryoko et al, 2020:122). Data sekunder diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, literatur dan teori.

Teknis analisis data meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis dapat dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (William N. Dunn, 2003:610) bahwa ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan efektifitas kebijakan desa wisata, diantaranya:

1. Pencapaian kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis;
2. Adaptasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis;
3. Integrasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis.

Untuk mengetahui sejauhmana Dimensi Efektifitas dalam Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis, dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

### **Pencapaian Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis**

Ada beberapa ukuran untuk mengetahui pencapaian kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis diantaranya: pertumbuhan jumlah wisatawan, pendapatan dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa seluruh informan menyatakan pencapaian kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis dengan melihat beberapa ukurannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: masih belum meratanya jumlah wisatawan dari luar, pendapatan yang masih kurang dikarenakan minimnya wisatawan dan pembangunan infrastruktur yang masih belum merata di beberapa desa wisata.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa ketergantungan pada wisatawan lokal dapat berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh desa wisata dan masyarakatnya, ditambah dengan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya wisatawan dari luar datang ke desa wisata, kebanyakan yang datang hanya desa-desa tetangga saja, sehingga berpengaruh kepada pendapat yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pencapaian kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis diketahui belum optimal mengingat Permasalahan utama terletak pada ketergantungan pada wisatawan lokal untuk pertumbuhan jumlah wisatawan, yang berpotensi mengurangi pendapatan desa wisata dan masyarakatnya. Adapun hambatan yang diketahui adalah kurangnya promosi dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pembangunan jalan, namun pembangunan tersebut belum mencakup semua desa wisata di Kabupaten Ciamis. Ketidakmerataan infrastruktur ini dapat memengaruhi aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung.

#### **Adaptasi Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis**

Ada beberapa ukuran untuk mengetahui adaptasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis diantaranya: respon terhadap perubahan trend pariwisata, perkembangan teknologi dan kemampuan desa dalam mengelola dan mempromosikan destinasi wisata secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa seluruh informan dari informan menyatakan bahwa adaptasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis dengan melihat beberapa ukurannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih kekurangan SDM yang berkompeten untuk mengelola dan mempromosikan desa wisatanya masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa untuk respon perubahan trend pariwisata sudah terbilang cukup baik namun masih ada yang belum mendukung karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisatanya. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan yang memadai dalam bidang pengelolaan dan pemasaran wisata.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adaptasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis diketahui belum optimal mengingat dalam beberapa kasus, meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap perubahan tren dan kebutuhan untuk meningkatkan promosi, namun hambatannya ialah kurangnya pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengelola media sosial dan pemasaran digital merupakan kendala yang nyata bagi pengelolaan dan promosi desa wisata. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah penyediaan pelatihan dan pendidikan formal maupun informal dalam bidang pengelolaan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam promosi.

#### **Integrasi Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis**

Ada beberapa ukuran untuk mengetahui integrasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis diantaranya: sinkronisasi kebijakan pariwisata lokal, regional dan nasional dan upaya memperkuat sinergi antara potensi lokal, budaya dan keberlanjutan dalam pengembangan desa wisata.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian informan menyatakan bahwa integrasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis dengan melihat beberapa ukurannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses informasi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa untuk sinkronisasi antar kebijakan dan dalam memperkuat sinergi sudah sangat baik, namun masih adanya keterbatasan akses ke informasi. Hal ini dapat dilihat dari informasi terkait kebijakan pariwisata regional dan nasional mungkin tidak selalu tersedia atau mudah diakses oleh pengelola desa wisata.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator integrasi kebijakan desa wisata di

Kabupaten Ciamis diketahui belum optimal mengingat untuk mencapai keberlanjutan dalam pengembangan desa wisata, perlu adanya pendekatan yang holistik dan terpadu, jadi tidak hanya fokus pada pendapatan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan keberlangsungan budaya. Adapun hambatan yang diketahui adalah keterbatasan akses ke informasi, sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan monitoring secara teratur terhadap kebijakan-kebijakan terbaru yang dirilis oleh pemerintah dapat membantu pengelola desa wisata tetap up-to-date dengan perubahan yang mungkin mempengaruhi operasi mereka.

Lalu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dimensi efektifitas belum optimal karena terdapat hambatan yaitu kurangnya promosi dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata, kurangnya pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengelola media sosial dan pemasaran digital dan keterbatasan akses ke informasi. Maka dari itu efektifitas perlu diterapkan dalam evaluasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis. Seperti yang dikemukakan menurut Azhar et al. (2022:54), "Efektifitas adalah sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan".

Sedangkan menurut Rifa'i (2013:132), "Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa efektifitas Kebijakan Desa Wisata itu harus ada seperti: pencapaian, adaptasi dan integrasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis, dengan dilihat dari beberapa ukuran diantaranya pertumbuhan jumlah wisatawan, pendapatan, pembangunan infrastruktur, respon terhadap perubahan trend pariwisata, perkembangan teknologi, kemampuan desa dalam mengelola dan mempromosikan, sinkronisasi antar pihak dan upaya memperkuat sinergi. Dengan begitu efektifitas kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis dapat bekerja dengan optimal.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian efektifitas kebijakan desa wisata di Kabupaten Ciamis masih rendah atau belum optimal, dilihat dari 3 indikator yang diukur semuanya belum berjalan dengan optimal yaitu pencapaian, adaptasi dan integrasi kebijakan desa wisata di Kabupaten ciamis.

Kemudian terdapat faktor penghambat yang dihadapi diantaranya:

1. Kurangnya promosi dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata;
2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengelola media sosial dan pemasaran digital;
3. Keterbatasan akses ke informasi.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya:

1. Pembangunan jalan;
2. Penyediaan pelatihan dan pendidikan;
3. Melakukan monitoring secara teratur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Abdullah, R., & Prihastuti, Y. (2023). Pengembangan Pola Perjalanan Wisata Di Desa Wisata Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara. *Jithor*, 6(2), 159–170. <http://ejournal.upi.edu/index.php/>
- Apriyan, A., & Nugroho, A. C. (2021). Aplikasi Pengelolaan Paket Perjalanan Wisata Berbasis Web pada CV Restu Bumi Adventure. *Jurnal Teknologi Terkini*, 1(2), 1–12.

- <http://teknologiterkini.org/index.php/terkini/article/view/26>
- Asiah, S. (2016). Efektifitas Kinerja Guru. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 1-11.
- Azhar, A. A., Prabowo, B., Nasir, M., Anisyah Hasibuan, Y., & Taufiq Azhari, M. (2022). Efektifitas Pembelajaran Daring Dimasa Pandemi Covid-19. *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains*, 2(2), 127-132. <https://doi.org/10.58432/algebra.v2i2.397>
- Ciamis, B. (2023). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
- Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi. In [umpo.ac.id](http://eprints.umpo.ac.id). Samudra Biru (Anggota IKAPI). [http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku_Ajar_Kebijakan_Publik.pdf)
- Erawati, I., Darwis, M., & Nasrullah, M. (2017). Efektifitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>
- Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik. In Intrans Publishing. [https://www.researchgate.net/publication/335788910\\_Buku\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik)
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105-117.
- Jordan. (2021). Perencanaan Perjalanan Wisata. *Ucoz.Com*, 53(9), 1689-1699. *Jurnal/Artikel*
- Kuntoro, W., & Mutaqi, A. S. (2023). Evaluasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa Wisata ( Studi Kasus Cangkringan ). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik (JURRITEK)*, 2(1), 104-112. <http://www.prin.or.id/index.php/JURRITEK/article/view/903>
- Kurniawan, P. A., & Undang, G. (2023). Evaluasi Kebijakan Dan Pelaksanaan Program Desa Wisata Di Kawasan Pariwisata Situ Ciburuy Desa Ciburuy. *Jurnal PKM BABAkti*, 01(1), 24-28. <http://journal2.unfari.ac.id/index.php/perceka/article/view/554>
- Nugroho SBM. (2008). Kebijakan Publik yang Pro-Publik. *Jurnal Riptek*, 1(2), 47-51. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=perilaku+asimetris+pe merintah+terhadap+transfer+pemerintah+pusat&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=perilaku+asimetris+pe merintah+terhadap+transfer+pemerintah+pusat&btnG=)
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Desa Wisata
- Peraturan Perundang-undangan**
- Ramdhani, A., & Ramadhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>
- Rifa'i, B. (2013). Efektifitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupatem Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 130-136. [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-16 Baktiar\\_KMP V1 N1 Jan-April 2013.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-16/Baktiar_KMP_V1_N1_Jan-April_2013.pdf)
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. UMSIDA Press.
- Rosalina, I. (2012). Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya*, 1, 0-216.
- Sadhana, K. (2011). Realitas Kebijakan Publik. In Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press). [https://eprints.unmer.ac.id/311/1/REALITAS\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK.pdf](https://eprints.unmer.ac.id/311/1/REALITAS_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf)
- Suryono, A. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>.
- William N. Dunn. (2003). William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003\_compressed-1.pdf (p. 710).